



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Serupa Tapi Tak Sama: Kebijakan *Credible Minimum Deterrence*
India-Pakistan sebagai Faktor Terciptanya Stabilitas Nuklir di
Kawasan Asia Selatan

Skripsi

Oleh

M. Farhan Yunas

2014330132

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Serupa Tapi Tak Sama: Kebijakan *Credible Minimum Deterrence*
India-Pakistan sebagai Faktor Terciptanya Stabilitas Nuklir di
Kawasan Asia Selatan

Skripsi

Oleh

M. Farhan Yunas

2014330132

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : M. Farhan Yunas
Nomor Pokok : 2014330132
Judul : Serupa Tapi Tak Sama: Kebijakan *Credible Minimum Deterrence*
India-Pakistan sebagai Faktor Terciptanya Stabilitas Nuklir di
Kawasan Asia Selatan


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
pada Senin, 18 Desember 2017
dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris merangkap pembimbing
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Anggota
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

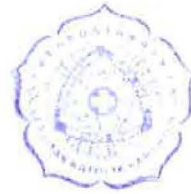
: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Farhan Yunas

NPM : 2014330132

Judul : Serupa Tapi Tak Sama: Kebijakan *Credible Minimum Deterrence* India-Pakistan sebagai Faktor Terciptanya Stabilitas Nuklir di Kawasan Asia Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan hasil karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun hasil karya maupun pendapat pihak lain dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Desember 2017

METERAI
TEMPEL

04923AEF878614165

6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Farhan Yunas

ABSTRAK

Nama : M. Farhan Yunas
NPM : 2014330132
Judul : Serupa Tapi Tak Sama: Kebijakan *Credible Minimum Deterrence* India-Pakistan sebagai Faktor Terciptanya Stabilitas Nuklir di Kawasan Asia Selatan

Penelitian ini berfokus pada hubungan nuklir antara India dan Pakistan sebagai dua negara kunci penentu stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan. Ditengah hubungan India dan Pakistan yang cenderung konfliktual, kedua negara justru memilih untuk melakukan pengembangan senjata nuklir sebagai instrumen keamanan negara. Secara normatif, keberadaan senjata nuklir ditengah kondisi hubungan dua negara seperti hubungan India dan Pakistan tersebut justru dapat menjadi katalis bila sewaktu-waktu konflik terjadi. Namun, kenyataannya, justru stabilitas yang terjadi berkat adanya kebijakan *Credible Minimum Deterrence* (CMD) yang ditujukan sebagai acuan penggunaan senjata nuklir bagi kedua negara. Oleh karena itu, melalui pertanyaan penelitian “*Bagaimana kebijakan Credible Minimum Deterrence India-Pakistan dapat menciptakan stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan?*”, penulis akan melihat faktor-faktor apa saja yang dihadirkan oleh kebijakan CMD sehingga dapat menciptakan stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan.

Penulis akan menggunakan beberapa konsep seperti *self-help*, *security dilemma*, *nuclear deterrence*, dan *balance of power* yang diadopsi dari teori neorealisme untuk menganalisis kebijakan CMD tersebut. Konsep-konsep tersebut akan disusun menggunakan metode analisis tematik untuk memolakan hubungan nuklir India dan Pakistan, mulai dari kedua negara melakukan *self-help* dengan melakukan proliferasi nuklir sebagai upaya pengamanan negara akibat munculnya *security dilemma*, hingga *nuclear deterrence* yang muncul saat kedua negara memiliki senjata nuklir dan pada akhirnya memunculkan *balance of power* sebagai alat ukur stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan. Selain itu, teori *posture optimization* akan dijadikan acuan dalam pengumpulan data.

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan CMD membuat India dan Pakistan memfungsikan senjata nuklir yang dimiliki untuk tujuan penggentaran. Penggentaran kedua negara tercapai dengan India memiliki kemampuan retaliasi dan Pakistan yang memiliki jumlah persenjataan yang lebih banyak dan langsung ditujukan kepada India. Tercapainya penggentaran tersebut menjadi indikator tercapainya *balance of power* dan stabilitas di kawasan Asia Selatan.

Kata kunci: nuklir, penggentaran, India, Pakistan, *Credible Minimum Deterrence*

ABSTRACT

Name : M. Farhan Yunas
Student ID : 2014330132
Title : Serupa Tapi Tak Sama: Kebijakan *Credible Minimum Deterrence* India-Pakistan sebagai Faktor Terciptanya Stabilitas Nuklir di Kawasan Asia Selatan

This research focuses on nuclear relationship between India and Pakistan as two nuclear stability determinants in South Asia. Amidst conflictual tension between the two, both somehow chose to develop nuclear weapons as the instrument of state security ensurement. Normatively, the existence of nuclear weapons amid conflictual tension mentioned above can actually be a catalyst towards nuclear war if at any time conflict occurs. But, in reality, contradictively, the stability somehow occurs due to the fact that Credible Minimum Deterrence (CMD) policy serves as a reference for the use of nuclear weapons for both states. Therefore, through the research question of "*How the Credible Minimum Deterrence policy of India-Pakistan can create nuclear stability in South Asia?*", the author looks at what factors are presented by the CMD policy so that it can create nuclear stability in South Asia.

Author uses some concepts such as self-help, security dilemma, nuclear deterrence, and balance of power that is adopted from neorealism theory in order to analyze the CMD policy. The concepts will be compiled using thematic analysis methods to create a pattern of chronological order of India and Pakistan's nuclear relations, started from self-help effort of nuclear proliferation from both states as a state security instrument due to the emergence of security dilemma, to the nuclear deterrence that rationally occurs due to the existence of nuclear weapons and ultimately led to balance of power as a measurement tool of nuclear stability in South Asia. In addition, posture optimization theory will be used as a reference in data collection process.

This research found that the CMD policy enables India and Pakistan to function nuclear weapons they possess for the purpose of deterrence. It is reached with India having retaliation capability and with Pakistan having greater amount of nuclear weapons that directly addressed towards India. When the deterrence is reached, so did balance of power as well as nuclear stability in South Asia.

Keyword: nuclear, deterrence, India, Pakistan, *Credible Minimum Deterrence*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penelitian ini mengangkat hubungan nuklir antara India dan Pakistan di kawasan Asia Selatan yang cenderung stabil meskipun kehadiran nuklir ditengah hubungan keduanya yang cenderung konfliktual dapat sewaktu-waktu mempercepat eskalasi konflik. Saat kedua negara memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklir untuk pertama kali, banyak kekhawatiran yang kemudian muncul mengingat hubungan kedua negara yang tidak pernah baik. Kekhawatiran tersebut datang dari negara-negara di luar kawasan Asia Selatan yang cemas akan kemungkinan perang nuklir antara India dan Pakistan. Namun, kekhawatiran tersebut sama sekali tidak terbukti berkat kedua negara mengadopsi kebijakan *Credible Minimum Deterrence* (CMD) yang dapat menjamin stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat faktor apa saja yang dihadirkan oleh kebijakan CMD sehingga dapat menciptakan stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan, bukan justru malah membuat hubungan India dan Pakistan semakin konfliktual. Besar harapan penulis dari penelitian ini dapat menghasilkan perspektif baru terkait pembahasan mengenai hubungan nuklir antara India dan Pakistan dilihat dari segi kebijakan nuklirnya. Namun, penulis tidak memungkiri masih adanya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, segala kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Bandung, 13 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata pengantar	iii
Daftar isi.....	iv
Daftar tabel.....	vi
Daftar diagram	vii
Daftar singkatan	viii
1. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Identifikasi masalah	3
1.2.1 Deskripsi masalah	3
1.2.2 Pembatasan masalah.....	5
1.2.3 Pertanyaan penelitian	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Tinjauan pustaka	7
1.5 Kerangka pemikiran.....	11
1.6 Metode penelitian.....	20
1.7 Sistematika pembahasan	22
2. BAB II KEBIJAKAN NUKLIR INDIA-PAKISTAN: TOLAK UKUR STABILITAS KAWASAN ASIA SELATAN	23
2.1 Peta postur nuklir India: retaliasi menjadi kunci	26
2.1.1 Kapabilitas nuklir India: kualitas diatas kuantitas	26
2.1.2 Kebijakan nuklir India: ancaman balasan	37
2.2 Peta postur nuklir Pakistan: manfaatkan bantuan untuk pengembangan	41
2.2.1 Kapabilitas nuklir Pakistan: kualitas diatas kuantitas	43
2.2.2 Kebijakan nuklir Pakistan: hanya kepada India	48
2.3 Relasi nuklir India-Pakistan: pra dan pasca CMD.....	52
2.3.1 Relasi nuklir India-Pakistan pra- <i>Credible Minimum</i> <i>Deterrence</i>	52
2.3.2 Relasi nuklir India-Pakistan pasca- <i>Credible Minimum</i> <i>Deterrence</i>	58

3. BAB III <i>BALANCE OF POWER</i> DAN <i>NUCLEAR DETERRENCE</i>	
DALAM STABILITAS NUKLIR ASIA SELATAN	60
3.1 <i>Self-help</i> dan <i>security dilemma</i> India-Pakistan: awal mula munculnya nuklir di Asia Selatan.....	61
3.1.1 <i>Self-help</i> India: tak butuh bantuan.....	62
3.1.2 <i>Self-help</i> Pakistan: AS dan Tiongkok menjadi ‘teman’	65
3.1.3 <i>Security dilemma</i> India-Pakistan: <i>nuclear arms race</i> dimulai .	67
3.2 <i>Nuclear deterrence</i> India-Pakistan: saling mengancam	69
3.3 <i>Balance of power</i> sebagai alat ukur stabilitas nuklir Asia Selatan	72
3.4 <i>Self-help</i> hingga <i>balance of power</i> : benang merah hubungan nuklir India-Pakistan	76
4. BAB IV KESIMPULAN	80
Daftar pustaka	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pertumbuhan hulu ledak nuklir India dari tahun 1998 – 2016....	32
Tabel 2.2 Kapabilitas nuklir India, 2017.....	33
Tabel 2.3 Pertumbuhan hulu ledak nuklir Pakistan dari tahun 1998 – 2016	44
Tabel 2.4 Kapabilitas nuklir Pakistan, 2016	46

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 <i>Flowchart</i> alur berpikir analisis kebijakan CMD.....	77
--	----

DAFTAR SINGKATAN

AERC	: Atomic Energy Research Center
AS	: Amerika Serikat
BARC	: Bhabba Atomic Research Center
CIRUS	: Canada-India Reactor United States
CMD	: Credible Minimum Deterrence
FU	: First-Use
HEU	: Highly-Enriched Uranium
INC	: Indian National Congress
kt	: kiloton
LoC	: Line of Control
MW	: Mega Watt
NFU	: No First-Use
NPT	: Non-proliferation Treaty
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PM	: Perdana Menteri
PNS	: Pakistan Navy Submarines
TNT	: trinitrotoluene

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa peta persaingan kekuatan militer Asia Selatan dikuasai oleh India dan Pakistan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa pengembangan nuklir yang dilakukan kedua negara berdampak pada dominasi keduanya di kawasan ini. Sampai pada tahun 1998, tercatat masing-masing Pakistan dan India sudah melakukan percobaan nuklir sebanyak 2 dan 3 kali.¹ Meskipun sedikit, namun kekuatan yang dihasilkan mencapai 70 kiloton per meter kubik, cukup untuk menghasilkan efek penggentaran ke negara-negara sekitar Asia Selatan, seperti Afghanistan, Bangladesh, bahkan bagian barat Tiongkok sekalipun.

Meskipun India dan Pakistan baru diperhatikan media barat sebagai sebuah ancaman setelah perang dingin berakhir tahun 1991,² namun tanda-tanda bahwa India memiliki kepentingan untuk mengembangkan nuklir mulai tampak ketika *Atomic Energy Act* tahun 1962 dijalankan. Butuh waktu 12 tahun hingga India melakukan percobaan nuklir pertamanya.³ Sejak saat itu, Pakistan, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan India, mempercepat pengembangan nuklir yang

¹ D.R. Sardesai dan Raju G.C. Thomas, *Nuclear India in the Twenty-First Century* (New York: Palgrave Macmillan, 2002), halaman 162.

² Richard Wietz, "South Asia's Nuclear Arms Racing," *The Diplomat*, 1 Oktober 2011.

³ Nuclear Weapon Archives, "India's Nuclear Weapon Program Smiling Buddha: 1974," 8 November 2001, diakses 5 Agustus 2017, <http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaSmiling.html>.

baru saja mereka temukan tahun 1972,⁴ membuat peristiwa ini menjadi tonggak awal ‘balapan’ nuklir di antara keduanya. Satu hal yang luput dari pandangan pemerintah India terhadap pengembangan senjata nuklir tersebut, yaitu tidak adanya perhatian khusus yang diberikan pemerintah India terhadap respon negara luar, termasuk Pakistan.

Tepat pada tanggal 18 Mei 1974, *Operation Smiling Buddha* terjadi.⁵ *Smiling Buddha* merupakan nama alias dari percobaan senjata nuklir pertama India yang sukses dilakukan. Percobaan ini juga menjadi percobaan pertama yang dilakukan oleh negara diluar anggota pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB: Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Perancis, dan Britania Raya yang secara notabene berstatus sebagai *nuclear-weapon states*. Jenis bom yang digunakan sama persis dengan apa yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang, pada tanggal 6 Maret 1945.⁶ Pakistan merasa terancam akibat lokasi percobaan bom nuklir tersebut berada tepat di perbatasan Pakistan-India bagian timur.⁷ Pada akhirnya, Pakistan berusaha untuk mengimbangi kekuatan nuklir India tersebut dengan juga melakukan proliferasi senjata nuklir, meskipun secara sumber daya, Pakistan lebih inferior ketimbang India.

Aksi-reaksi yang terjadi antara India dan Pakistan, secara normatif, dapat mengakibatkan instabilitas di kawasan Asia Selatan. Belum adanya kebijakan nuklir yang *ajeg* oleh kedua negara juga menjadi kekhawatiran tersendiri dengan

⁴ Federation of American Scientists, “Pakistan Nuclear Weapons,” diakses 31 Oktober 2017, <https://fas.org/nuke/guide/pakistan/nuke/>.

⁵ Nuclear, “India’s Nuclear”, <http://nuclearweaponarchive.org/India/IndiaSmiling.html>.

⁶ Ibid.

⁷ George Perkovich, *India’s Nuclear Bomb: The Impact on Global Proliferation* (Berkeley: University of California Press, 1999), halaman 159.

tidak ada yang tahu pasti di antara keduanya dapat sewaktu-waktu melancarkan *pre-emptive strike*. Ketidakpastian ini menjadi salah satu faktor belum terjaminnya stabilitas di kawasan ini. Lahirnya NPT menjadi bukti nyata akan kekhawatiran negara-negara pemilik senjata nuklir seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris akan *nuclear arms race* yang terjadi di Asia Selatan dengan berpandangan bahwa *nuclear arms race* tersebut akan mengganggu stabilitas kawasan.⁸ Apalagi dengan tendensi kedua negara untuk menyelesaikan pertikaian dengan kekuatan militer seperti beberapa perang yang pernah terjadi dengan ketakutan bahwa peperangan tersebut akan tereskalasi ke tahap perang nuklir dan mengganggu stabilitas kawasan.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Pada kenyataannya, ketidakstabilan yang dikhawatirkan akan terjadi malah berbuah sebaliknya. Hal ini muncul ketika kedua negara kompak menjadikan *Credible Minimum Deterrence* (CMD) sebagai kebijakan dan dasar utama penggunaan senjata nuklir masing-masing negara. Kebijakan CMD adalah sebuah kebijakan nuklir yang diadopsi oleh India dan Pakistan untuk dapat, secara efektif, memfungsikan senjata nuklir yang dimiliki untuk dapat saling memberikan penggentaran satu sama lain.⁹ Kebijakan ini mampu untuk menjawab keraguan negara-negara di luar kawasan Asia Selatan akan kapabilitas India dan Pakistan

⁸ Muthiah Alagappa, "International Response to Nuclear Tests in South Asia: The Need for a New Policy Framework," Asia Pacific Issues (Washington, D.C.: East-West Institute, 1998).

⁹ Beenish Altaf, "Understanding of Credible Minimum Deterrence, Nuclear Policy and Deterrent Postures," South Asian Voices, 3 April 2015, diakses 9 Desember 2017, <https://southasianvoices.org/understanding-of-credible-minimum-deterrence-nuclear-policy-and-deterrent-postures/>.

dalam menjaga stabilitas nuklir di kawasan ini, mengingat kecenderungan kedua negara untuk saling berkonflik sangat tinggi. Namun nyatanya, setelah kebijakan CMD dianut oleh kedua negara, stabilitas kawasan dari perang nuklir dapat tercapai dengan tidak adanya konflik-konflik konvensional yang dialami kedua negara berujung pada perang nuklir.

Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa konflik yang terjadi setelah kebijakan CMD diadopsi oleh India dan Pakistan pada tahun 1998. Contohnya pada tahun 2001-2002, ketika *Operation Parakram* dilancarkan oleh India sebagai akibat dari masuknya tentara Pakistan ke wilayah Jammu dan Kashmir yang dikuasai oleh pemerintah India.¹⁰ Sekitar 800.000 tentara dari kedua negara sudah dinyatakan siap untuk memulai perang. Akan tetapi, inferioritas alutsista militer Pakistan terhadap India membuat Pakistan, secara rasional, seharusnya menggunakan senjata nuklir untuk *gain advantage* terhadap inferioritas tersebut. George Fernandes, Menteri Pertahanan India kala itu, memberikan pernyataannya: "*Pakistan can't think of using nuclear weapons. We could take a strike, survive and then hit back. Pakistan would be finished*".¹¹ Logika ini dapat membuktikan bahwa Pakistan tidak akan mungkin menggunakan senjata nuklir yang dimiliki untuk mengatasi inferioritas tersebut.

Peristiwa di atas cukup untuk menggambarkan stabilitas nuklir yang terjadi di Asia Selatan dengan beberapa peristiwa yang terjadi setelahnya hanya sebatas

¹⁰ Sandeep Bhardwaj, "The 2001-2002 India-Pakistan Standoff (Operation Parakram): A Dangerous Experiment," 17 Juli 2013, diakses 6 Desember 2017, <https://revisitingindia.com/2013/07/17/the-2001-2002-india-pakistan-standoff-operation-parakram-a-dangerous-experiment/>.

¹¹ Rajesh M. Basrur, *Minimum Deterrence and India's Nuclear Security* (Singapore: NUS Press, 2009), halaman 87.

konflik perbatasan semata. Konflik-konflik ini tidak sampai berujung pada konflik terbuka, bahkan perang nuklir sekalipun. Padahal, secara normatif, ketika dua negara dalam suatu kawasan memiliki senjata nuklir, apalagi jika hubungan kedua negara tersebut cenderung konfliktual, maka kecenderungan munculnya perang nuklir akan semakin besar. Realitanya, pada kasus India dan Pakistan, justru stabilitas nuklir yang terjadi dengan tidak adanya konflik-konflik yang terjadi berujung pada perang nuklir.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis akan membatasi masalah dengan menggambarkan konfigurasi *power* di Asia Selatan hanya pada India dan Pakistan saja. Hal ini dikarenakan kedua negara inilah yang memegang dominasi penuh terhadap perkembangan senjata nuklir di kawasan Asia Selatan. Dengan kata lain, India dan Pakistan menjadi penentu kestabilan nuklir di kawasan ini. Pembahasan mengenai peran Tiongkok dan Amerika Serikat pada kawasan ini pun dibatasi hanya pada saat Pakistan memanfaatkan bantuan kedua negara tersebut dalam proliferasi nuklirnya.

Proliferasi nuklir India dan Pakistan dibatasi hanya dari segi kapabilitas dan kebijakan nuklir kedua negara saja. Hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut sudah cukup menggambarkan peran kebijakan CMD dalam menciptakan stabilitas nuklir India dan Pakistan. Penulis menyadari kurangnya penelitian mengenai faktor kebijakan CMD sebagai penentu stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan, sehingga

diharapkan penelitian ini dapat memperkaya topik pembahasan mengenai hubungan nuklir kedua negara di Asia Selatan.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, penulis mengambil pertanyaan penelitian sebagai berikut.

“Bagaimana kebijakan Credible Minimum Deterrence India-Pakistan dapat menciptakan stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- menggambarkan kapabilitas nuklir yang dimiliki oleh India dan Pakistan untuk melihat *nuclear arms race* yang terjadi hingga kedua negara dapat dikatakan *nuclear-capable* secara *de facto*,
- menggambarkan kebijakan nuklir yang dipakai oleh India dan Pakistan untuk melihat bagaimana masing-masing negara memfungsikan kapabilitas nuklir yang dimiliki, serta
- menganalisis peran kebijakan CMD untuk dapat menciptakan stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Kepemilikan senjata nuklir dalam suatu kawasan masih menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli, apakah kepemilikan tersebut dapat berdampak pada stabilitas kawasan atau justru malah meningkatkan tensi dan kecenderungan konflik di kawasan tersebut, terutama untuk kasus India dan Pakistan. Secara garis besar, perdebatan tersebut dibagi atas dua kubu: kubu pertama yang menyatakan kestabilan dapat terjamin akibat kepemilikan senjata nuklir tersebut dan kubu kedua yang menyatakan bahwa instabilitas yang justru muncul. Kubu pertama diwakili oleh Rajesh M. Basrur dalam bukunya *South Asia's Cold War: Nuclear Weapons and Conflict in Comparative Perspective*¹² dan Feroz H. Khan dalam *Challenges to Nuclear Stability in South Asia*.¹³ Sementara kubu kedua diwakili oleh S. Paul Kapur dalam tulisannya yang berjudul *Revisionist Ambitions, Conventional Capabilities, and Nuclear Instability: Why Nuclear South Asia is not like Cold War Europe*¹⁴ dan Sanjeev Kumar dalam tulisannya yang berjudul *Nuclear Weaponisation and the Nature of Conflict in South Asia*.¹⁵

Basrur menjelaskan bahwa ada tiga konflik yang dapat menjelaskan hubungan India-Pakistan dari sisi nuklir: konflik Jammu-Kashmir tahun 1990, Perang Kargil tahun 1999, dan konflik *Operation Parakram* tahun 2001. Meskipun ketiga konflik ini tidak melibatkan senjata nuklir secara langsung, namun senjata nuklir tersebut

¹² Rajesh M. Basrur, *South Asia's Cold War: Nuclear Weapons and Conflict in Comparative Perspective* (New York: Routledge, 2008).

¹³ Feroz H. Khan, "Challenges to Nuclear Stability in South Asia," *The Nonproliferation Review* 10, no. 1 (2003): 59–74.

¹⁴ S. Paul Kapur, "Revisionist Ambitions, Conventional Capabilities, and Nuclear Instability: Why Nuclear South Asia is not like Cold War Europe," dalam *Inside Nuclear South Asia* (California: Stanford University Press, 2009).

¹⁵ Sanjeev Kumar, "Nuclear Weaponisation and the Nature of Conflict in South Asia," *Turkish Journal of Politics* 5, no. 2 (2014): 83–99.

memiliki peranan yang cukup signifikan untuk menentukan jalannya konflik. Menurut Basrur, ketiga konflik ini memiliki pola yang sama, yaitu konfrontasi, konflik, lalu negosiasi.¹⁶ Pola ini lahir melalui konsep *limited war* yang faktanya benar terjadi pada ketiga konflik tersebut. *Limited war*, dalam sudut pandang nuklir, adalah sebuah kondisi dimana perang yang muncul hanya sebatas perang konvensional semata, tanpa adanya kemungkinan untuk perang tersebut tereskalasi menjadi perang nuklir.¹⁷ Singkatnya, kedua negara mengusahakan tercapainya kesepakatan untuk menghentikan konflik sesegera mungkin sebelum kemungkinan yang lebih buruk terjadi.

Merujuk pada fakta tersebut, menurut Basrur, kondisi Asia Selatan dapat dikatakan stabil, setidaknya dari ancaman perang nuklir. Hal ini dapat terjadi berkat rasionalitas kedua negara akan terjadinya kehancuran yang masif jika keduanya terlibat dalam perang nuklir.¹⁸ Meskipun Basrur tidak mengabaikan sisi normatif dari kepemilikan senjata nuklir yang berujung pada suasana konfliktual, namun rasionalitas tersebut yang menghambat India dan Pakistan untuk terlibat dalam konflik yang lebih besar dari tiga konflik tersebut.

Senada dengan Basrur, Khan berpendapat bahwa stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan sudah terjaga dengan baik. Menurut Khan, ada empat kriteria yang dapat menyatakan bahwa kawasan Asia Selatan dapat dikatakan stabil. Pertama, dengan India memiliki kemampuan *second-strike*, Pakistan, sebagai *direct opposition* dari India, akan mengurangi bahkan menghapus kemungkinan Pakistan

¹⁶ Rajesh, *South Asia's*, op.cit., halaman 55.

¹⁷ Ibid, halaman 104.

¹⁸ Ibid.

menggunakan kemampuan *first-strike* yang dimiliki.¹⁹ Kedua, instabilitas tercipta ketika kedua negara siap untuk mengubah *status quo* (ketiadaan perang nuklir) dan bersiap-siap untuk mengeskalasi tensi ke arah perang nuklir tanpa adanya rasa takut akan konsekuensi dari perang tersebut.²⁰ Sampai saat ini, India dan Pakistan sangat mempertimbangkan konsekuensi tersebut. Dengan kata lain, kemungkinan perang tersebut tereskalasi menjadi sangat kecil.

Ketiga, tidak ada toleransi yang diberikan terhadap miscalculation penggunaan senjata nuklir, baik dari segi strategis maupun taktis.²¹ Hal ini menyebabkan kedua negara memilih untuk tidak menggunakan senjata nuklir akibat ketakutan akan miscalculation tersebut. Terakhir, India dan Pakistan memahami kekuatan nuklir masing-masing negara: India dengan kemampuan retaliasinya dan Pakistan dengan kemampuan *first-strike* yang dapat sewaktu-waktu mengancam India.²² Akibat kedua negara menganggap bahwa penggunaan senjata nuklir akan mengakibatkan kehancuran yang masif, maka ketiadaan perang nuklir tersebut membuat keadaan kawasan ini stabil.

Berbeda dengan dua tulisan sebelumnya, Kapur melihat bahwa kepemilikan senjata nuklir di suatu kawasan justru membuat kawasan tersebut berpotensi tidak stabil. Hal ini dikarenakan, secara normatif, kepemilikan senjata nuklir tersebut dapat berujung pada kemungkinan akan adanya perang nuklir. Kemungkinan tersebut ditandai dengan kegagalan penggentaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat *nature* dari India dan Pakistan yang cenderung konfliktual. Kapur

¹⁹ Feroz, "Challenges to", *op.cit.*, halaman 62.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

berpendapat bahwa jika konflik yang bersifat konvensional tidak dapat ditangani dengan baik, maka eskalasi konflik tersebut menuju perang nuklir akan semakin tinggi kemungkinannya.²³ Hal ini terbukti dengan konflik Kargil tahun 1999 yang hampir memaksa kedua negara untuk menempatkan senjata nuklir di dekat perbatasan. Oleh karenanya, dengan masih adanya kekhawatiran akan kemungkinan-kemungkinan di atas, kawasan Asia Selatan, menurut Kapur, belum dapat dikatakan stabil dari perang nuklir.

Sependapat dengan Kapur, Kumar berargumen bahwa kondisi kawasan Asia Selatan belum dapat dikatakan stabil dari ancaman perang nuklir. Ada dua pendapat yang menegaskan keadaan tersebut. Pertama, *nature of conflict* yang sangat kental terasa antara India dan Pakistan menjadi faktor tersendiri tingginya kemungkinan eskalasi konflik menuju perang nuklir.²⁴ Selama *nature* tersebut belum hilang sepenuhnya, maka kemungkinan serta kekhawatiran akan terjadinya perang nuklir tersebut akan tetap ada. Kedua, ketidakseimbangan kekuatan antara India dan Pakistan juga menjadi faktor lain yang dapat membuat kawasan ini menjadi tidak stabil. Kumar menilai bahwa *power asymmetry* yang ada dari segi kekuatan nuklir akan meningkatkan kemungkinan konflik yang terjadi secara berkelanjutan.²⁵ Selama kedua negara tidak berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan yang ada, maka stabilitas tidak akan pernah tercapai.

Dari perdebatan di atas, jelas terlihat bahwa ada beberapa sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing ahli untuk menjelaskan posisi tulisan mereka

²³ Kapur, "Revisionist Ambitions", op.cit., halaman 184.

²⁴ Sanjeev, "Nuclear Weaponisation", op.cit., halaman 97.

²⁵ Ibid.

terhadap perdebatan apakah keberadaan nuklir di kawasan Asia Selatan dapat membuat kawasan ini stabil atau tidak. Namun, ketiadaan perspektif kebijakan nuklir dari tulisan-tulisan di atas, terutama kebijakan CMD, membuat penelitian ini menjadi pembeda dan dapat menambah sudut pandang baru dalam perdebatan di atas. Penulis, dalam perdebatan di atas, memposisikan penelitian ini lebih kepada stabilitas yang tercipta akibat keberadaan nuklir. Sudut pandang kebijakan nuklir CMD yang penulis pakai akan semakin memperkaya perdebatan yang ada.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penulis memahami pentingnya dasar pemikiran yang akan mengarahkan hasil dari penelitian ini. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa konsep dan teori untuk mengkategorikan data-data serta untuk membangun kerangka analisis terkait peran kebijakan CMD dalam menciptakan stabilitas nuklir di Asia Selatan. Untuk membantu penulis dalam mengkategorikan data-data terkait kapabilitas dan kebijakan nuklir yang digunakan India dan Pakistan, penulis menggunakan teori *Posture Optimization*. Sementara itu, untuk membantu penulis membangun kerangka analisis hingga menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian diatas, penulis akan menggunakan konsep *self-help*, *security dilemma*, *balance of power*, dan *nuclear deterrence* yang diadopsi dari teori neorealisme.

Teori *Posture Optimization* pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli nuklir bernama Vipin Narang pada tahun 2014. Teori ini dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Nuclear Strategy in the Modern Era: Regional Powers and International*

Conflict.²⁶ Narang berpendapat bahwa untuk melihat postur nuklir yang dipilih oleh suatu negara didalam sebuah kawasan tidak bisa disamakan dengan postur nuklir yang dipilih oleh negara-negara *superpower* seperti Amerika Serikat maupun Rusia. Negara-negara *superpower* tersebut akan cenderung untuk memilih postur yang sesuai dengan kapabilitas dan statusnya sebagai negara adidaya.²⁷ Narang mencontohkan pemikiran tersebut dengan *range* kapabilitas nuklir yang lebih besar, seperti adanya kemampuan *first-strike* hingga kemampuan *second-strike* yang masif, sesuai dengan fungsinya untuk melancarkan penggentaran ke negara-negara di seluruh dunia. Sementara negara-negara di suatu kawasan yang memiliki kemampuan nuklir juga memilih postur nuklir dengan pertimbangan yang sama, namun tetap disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan negara tersebut. Biasanya, menurut Narang, negara-negara tersebut akan memiliki *range* kapabilitas nuklir yang lebih kecil, seperti hanya memiliki salah satu diantara kemampuan *first-strike* dan *second-strike* saja.

Pemilihan postur nuklir oleh negara-negara dalam suatu kawasan ini didasarkan pada empat hal: *Primary Envisioned Employment*, *Capabilities*, *Management*, dan *Level of Transparency*.²⁸ Dikarenakan penelitian ini hanya membutuhkan *Primary Envisioned Employment* dan *Capabilities* saja, maka dasar-dasar lain dapat dianggap sebagai konstanta. *Primary Envisioned Employment* berarti gambaran mengenai tujuan utama penggunaan senjata nuklir tersebut di dalam kawasan. Dasar ini dijadikan kebijakan utama bagi suatu negara yang

²⁶ Vipin Narang, *Nuclear Strategy in the Modern Era: Regional Powers and International Conflict* (New Jersey: Princeton University Press, 2014).

²⁷ Ibid, halaman 14.

²⁸ Ibid, halaman 15.

nantinya akan terlihat dengan bagaimana negara tersebut memfungsikan senjata nuklir yang dimiliki. Sementara *capabilities* berarti sejauh mana kemampuan senjata nuklir yang dimiliki negara tersebut dapat mengoptimalkan efektivitas kebijakan nuklirnya. Kedua dasar ini saling mempengaruhi satu sama lain, terutama dalam proses penentuan kebijakan nuklir negara tersebut.

Dasar-dasar tersebut dijadikan pembeda bagi masing-masing postur yang dibagi oleh Narang menjadi tiga: *Catalytic*, *Assured Retaliation*, dan *Assymetric Escalation*.²⁹ Secara singkat, postur *catalytic* dipakai dengan melihat keadaan bahwa negara tersebut membutuhkan katalis untuk dapat mempercepat pengembangan senjata nuklir yang dimiliki. Katalis ini, menurut Narang, dapat berupa bantuan dana maupun bantuan alutsista militer yang diberikan oleh negara di luar kawasan. Bantuan yang diberikan dapat dikategorikan berdasarkan ancaman penggunaan bom nuklir dari pihak yang dibantu atau negara yang membantu memiliki kepentingan lain di kawasan tersebut. Dari segi kapabilitas, negara yang menggunakan postur ini sudah mampu untuk membuat bom nuklir sederhana. Namun, dari segi kebijakan, negara pengguna postur ini belum memiliki kebijakan yang *ajeg*. Hal ini dikarenakan penggunaan senjata nuklir tersebut hanya ditujukan untuk memberikan ancaman terhadap negara-negara *superpower* di luar kawasan akan penggunaan senjata nuklir tersebut.

Assured Retaliation merupakan postur yang mengutamakan penggentaran langsung berupa kemampuan *second-strike* atau sering disebut retaliasi. Hal ini dapat tercapai meskipun negara tersebut sudah mendapat serangan nuklir terlebih

²⁹ Ibid, halaman 19.

dahulu. Dalam koridor kapabilitas nuklir, negara yang menggunakan postur ini, secara teknis, memanfaatkan serangan retaliasi tersebut dengan penggunaan kemampuan nuklir yang bersifat *sea-based*, seperti kapal selam. Kemampuan ini akan sangat efektif dikarenakan sulitnya mencari informasi terkait keberadaan kapal selam tersebut, sehingga waktu peluncuran senjata nuklir tersebut juga sulit untuk diperkirakan. Pada akhirnya, negara yang pertama kali melakukan serangan akan mempertimbangkan hal tersebut dikarenakan kepastian retaliasi tersebut sangatlah tinggi dan dapat mengakibatkan kehancuran yang masif. Sementara, dari segi kebijakan, negara pengguna postur ini akan menggunakan kebijakan *no first-use* dikarenakan kemampuan retaliasi yang dimiliki dirasa sudah cukup untuk memberikan penggentaran kepada negara lain.

Sementara *Assymetric Escalation* berarti senjata nuklir digunakan untuk melakukan penggentaran langsung dengan menggunakannya sebagai alat perang. Hal ini membuat negara yang memakai postur ini menjadi negara yang pertama kali menggunakan senjata nuklir langsung untuk menyerang militer maupun masyarakat di negara lain. Dengan kata lain, negara ini memiliki kemampuan *first-use* yang dapat sewaktu-waktu dipakai sebagai alat perang. Secara kapabilitas, negara yang menggunakan postur ini memiliki senjata nuklir dalam jumlah yang banyak berkat fungsinya sebagai alat perang tersebut. Kebijakan yang digunakan adalah kebijakan *first-use* untuk memastikan penggentaran yang dilancarkan akibat perbedaan yang cukup jauh dari segi alutsista militer konvensional dapat tercapai. Penggunaan postur ini diprioritaskan dalam perang konvensional agar negara tersebut

mendapatkan *advantage* lebih akibat kekurangan yang dimiliki dari sisi militer konvensional, seperti tentara, tank, persenjataan, dll.

Neorealisme, sebagai teori yang diadopsi oleh konsep-konsep yang dipakai pada penelitian ini, merupakan sebuah teori yang melihat sistem sebagai penentu arah kebijakan suatu negara. Teori ini pertama kali diprakarsai oleh Kenneth Waltz dalam bukunya *Theory of International Politics*.³⁰ Waltz menulis bahwa negara, sebagai *sole actor* dalam politik internasional, memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Namun, hal ini tidak semata-mata berasal dari faktor internal negara tersebut saja, melainkan ada struktur yang dapat membaca arah pergerakan negara-negara sekitar.

Waltz bergerak dari pemikiran dasar realisme bahwa negara adalah aktor yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam tatanan politik internasional. Namun, Waltz memiliki pendekatan yang berbeda dari realisme klasik. Realisme klasik lebih melihat negara sebagai aktor yang jahat dan lebih mementingkan *power* dibanding kerjasama,³¹ sementara neorealisme lebih melihat sistem internasional sebagai penentu arah kebijakan suatu negara serta perubahan yang berkelanjutan yang terjadi didalamnya.³²

Neorealisme menjelaskan sistem yang terdiri dari struktur penyusun sistem dan unit-unit yang berinteraksi didalamnya.³³ Struktur dapat didefinisikan sebagai susunan dari bagian-bagian yang terdapat dalam suatu sistem. Menurut Waltz,

³⁰ Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1979).

³¹ Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2013), halaman 49.

³² Ibid, halaman 79.

³³ Kenneth, "Theory of", op.cit, halaman 79.

struktur ini merupakan abstraksi dari sistem yang tak terlihat. Namun, jika struktur (yang tak terlihat tersebut) berubah, maka sistem pun akan berubah. Dalam mendefinisikan struktur tersebut, neorealisme tidak melihat kualitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh unit-unit penyusun tersebut, melainkan bagaimana struktur dapat mempengaruhi unit-unit yang ada dalam suatu sistem. Struktur dapat dilihat juga sebagai susunan entitas politik yang ada dalam suatu sistem. Hal ini berbeda dengan politik domestik dari unit-unit tersebut yang bersifat hirarki.

Neorealisme bergerak dari sistem anarki sebagai keadaan awal sistem internasional pada saat itu. Sistem anarki dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana tidak adanya pemimpin maupun pemerintahan di atas negara, sehingga negara dapat melakukan apapun sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Dalam sistem ini, negara memiliki opsi untuk menggunakan *violence* dan *the use of force* dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam tataran internasional, sehingga diperlukan suatu usaha khusus untuk melindungi diri (negara) jika sewaktu-waktu *the use of force* tersebut digunakan oleh negara lain terhadapnya.

Oleh karenanya, muncul konsep *self-help*. Konsep ini merupakan respon suatu negara terhadap kemungkinan *the use of force* yang dapat dilakukan negara lain. *Self-help* pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk melindungi diri dari ancaman negara lain.³⁴ Konsep ini menjadi dasar dari salah satu tujuan negara: *survive*. *Insecurity* yang dirasakan negara-negara tersebut dapat berdampak pada keputusan yang akan diambil selanjutnya. *Self-help*, sesuai dengan *nature of the state*, akan lebih berorientasi pada penguatan kapabilitas militer yang dimiliki oleh

³⁴ Ibid, halaman 105.

negara. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan, mulai dari menganggarkan pendapatan negara untuk kebutuhan militer, hingga bekerjasama dengan negara lain untuk mendapatkan keuntungan dari segi militer.

Hasil upaya *self-help* suatu negara tersebut, jika membuahkan hasil (berupa kapabilitas militer yang meningkat, dsb.), juga akan memperbesar *insecurity* dari negara-negara lain di sekitar negara tersebut. *Insecurity* ini dapat dikategorikan sebagai *security dilemma*. Menurut John Herz dalam bukunya *Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities*, *security dilemma* dapat diartikan sebagai kekhawatiran yang muncul bagi negara dari ancaman penyerangan negara lain yang diakibatkan oleh tidak adanya entitas lain yang lebih tinggi untuk mengatur perilaku negara-negara tersebut, sehingga ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh negara-negara tersebut.³⁵ Ketidakpastian tersebut juga membuat negara-negara cenderung untuk memperkuat diri dengan kekuatan militer yang dapat melebihi kekuatan militer rivalnya. Hal ini berhubungan dengan keputusan negara melakukan *self-help*.

John Herz melihat ada empat aspek dalam *security dilemma*: (1) ketiadaan entitas yang lebih tinggi statusnya dari negara merupakan sumber utama dari *security dilemma*; (2) sebab munculnya *security dilemma* adalah ketidakpastian dan ketakutan akan intensi negara-negara dalam suatu sistem terhadap masing-masingnya; (3) *self-help* sebagai cara negara-negara tersebut untuk lepas dari *security dilemma* dan menjamin keamanan negara dari ancaman-ancaman yang

³⁵ John Herz, *Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities* (Chicago: University of Chicago Press, 1951), halaman 157.

sewaktu-waktu dapat terjadi; dan (4) dengan negara-negara tersebut saling melakukan *self-help* satu sama lain, akan terjadi *vicious cycle of security dilemma* yang dapat menjadi indikator terjadinya keseimbangan kekuatan dalam sistem tersebut.³⁶ Dari aspek-aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa *balance of power* dapat muncul dari *vicious cycle of security dilemma* yang pada akhirnya menciptakan stabilitas di kawasan tersebut.

Istilah *Balance of Power* didefinisikan pertama kali oleh Hans Joachim Morgenthau dalam buku *Politic Among Nations* tahun 1948. Menurutnya, *Balance of Power* memiliki beberapa pengertian:³⁷ (1) sebagai kekuatan yang berimbang dalam suatu sistem, dan (2) sebagai distribusi kekuatan. Definisi diatas memperlihatkan bahwa dasar dari munculnya *Balance of Power* adalah murni lahir dari kepentingan nasional sebuah negara sebagai reaksi atas kepentingan nasional negara lain dalam suatu sistem. Menurut Waltz, *Balance of Power* dapat tercipta ketika dua negara dalam suatu sistem memiliki indikator tertentu yang kemudian menyebabkan kedua negara tersebut untuk tidak saling menyerang satu sama lain.³⁸ Indikator tersebut dapat berupa intensi kedua negara untuk menciptakan stabilitas dalam sistem tersebut dengan beberapa cara, termasuk kebijakan dari dua negara tersebut.³⁹ Pernyataan ini turut diperkuat oleh Michael Sheehan dalam bukunya *The Balance of Power: History and Theory* dengan menyebutkan bahwa stabilitas nuklir dalam suatu kawasan akan tercipta ketika kedua negara berusaha untuk

³⁶ Shiping Tang, "The Security Dilemma: A Conceptual Analysis," *Security Studies* 18, no. 3 (2009): 593.

³⁷ Hans J. Morgenthau, *Politic Among Nations* (New York: McGraw-Hill, 1948), halaman 187.

³⁸ Kenneth, *Theory of*, op.cit., halaman 119.

³⁹ Ibid, halaman 120.

menghindari perang dengan membuat suatu kebijakan luar negeri yang dapat menjaga ketiadaan perang tersebut.⁴⁰ Stabilitas, melalui *balance of power*, juga dapat tercipta ketika kedua negara tersebut mampu menyeimbangkan kekuatan militer konvensional sehingga kecenderungan untuk mencapai perang nuklir pun dapat dihindarkan.⁴¹

Konsep *nuclear deterrence* lahir ketika perang dingin terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca perang dunia ke-II. Secara mendasar, *nuclear deterrence*, menurut Bernard Brodie dalam bukunya *The Absolute Weapon: Atomic Power and World Order*, adalah suatu keadaan dimana suatu negara, yang awalnya ingin melancarkan serangan *pre-emptive* kepada negara lain, takut akan ancaman retaliasi dari negara tersebut yang pada akhirnya menyebabkan sang agresor enggan untuk melancarkan serangan.⁴² Keengganan tersebut menyebabkan stabilitas dan *status quo* akan ketiadaan perang dapat terjamin.

Nuclear deterrence memiliki pengertian serupa dengan *existensial deterrence*, sebuah konsep yang dicetuskan oleh McGeorge Bundy pada tahun 1988. Bundy menjelaskan bahwa informasi yang didapat akan kekuatan nuklir masing-masing negara dapat dikatakan terbatas. Oleh karenanya, negara-negara tersebut, secara rasional, hanya cukup mengetahui bahwa kedua negara tergolong *nuclear-capable*

⁴⁰ Michael Sheehan, *The Balance of Power: History and Theory* (London: Routledge, 1996), halaman 186.

⁴¹ Glenn Snyder, "The Balance of Power and the Balance of Terror," dalam *Balance of Power* (San Fransisco: Chandler, 1965), halaman 199.

⁴² Bernard Brodie, *The Absolute Weapon: Atomic Power and World Order* (Connecticut: Yale Institute of International Studies, 1946), halaman 2.

untuk tidak saling terlibat dalam perang nuklir.⁴³ Dengan ini, stabilitas dalam kawasan tersebut dapat tercapai.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara singkat, pengertian dari metode ini, menurut Alan Bryman, dapat dibagi menjadi tiga karakteristik:⁴⁴

- a. mengutamakan penggunaan ‘kata’ dibandingkan ‘angka’ untuk mengumpulkan data maupun untuk melakukan analisis,
- b. menggunakan pendekatan induktif untuk menjelaskan hubungan teori dan analisis dimana analisis dilakukan dengan menggunakan teori dan konsep hingga jawaban atas pertanyaan penelitian ditemukan di akhir penelitian, serta
- c. peneliti memiliki interpretasi tersendiri dalam memahami interaksi antar subjek (dilihat sebagai masalah) dan mencari penyebab dari masalah tersebut, sehingga tak heran perdebatan muncul dari permasalahan tersebut mengingat para peneliti memiliki interpretasi yang berbeda-beda.

Dalam mengkategorisasikan data, penulis menggunakan metode *inductive and deductive data analysis* oleh Creswell. Menurut Creswell, secara induktif, peneliti akan mengumpulkan data-data yang ada untuk kemudian ditelaah dan dicari tema besarnya. Setelah tema besar didapat, penulis akan membuat pola terkait penyebab

⁴³ Arvind Kumar, “Theories of Deterrence and Nuclear Deterrence in the Subcontinent,” dalam *The India-Pakistan Nuclear Relationship: Theories of Deterrence and International Relations* (New Delhi: Routledge, 2007), halaman 240.

⁴⁴ Alan Bryman, *Social Research Methods*, edisi 4 (Oxford: Oxford University Press, 2012), halaman 380.

munculnya masalah dan keterkaitannya dengan teori yang dipakai.⁴⁵ Pola ini menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dan akan memposisikan penulis pada salah satu sisi dari perdebatan yang ada tentang masalah yang diangkat. Setelah pola didapat, secara deduktif, penulis akan melihat kembali data-data tersebut untuk mencari informasi tambahan yang dapat mendukung tema besar tersebut.⁴⁶ Data-data yang dipakai berasal dari sejumlah sumber yang berbeda, diantaranya berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah, dokumen resmi pemerintah, berita, serta laman web resmi yang tergolong dalam *qualitative documents* menurut Creswell.

Dalam melakukan analisis dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis tematik. Metode ini berfokus pada pencarian tema besar yang ada dalam setiap data yang didapat untuk kemudian dicarikan ‘benang merah’nya terkait apa penyebab dari permasalahan yang dibahas.⁴⁷ Metode ini juga melihat kesamaan yang muncul terkait hubungan antara permasalahan yang dibahas dengan data-data yang didapat. Adanya hubungan sebab-akibat diantara data dan permasalahan yang dibahas menjadi salah satu indikator utama pencarian ‘benang merah’ permasalahan tersebut. Selain itu, penggunaan teori dan konsep untuk dapat menjelaskan permasalahan juga menjadi indikator utama lainnya untuk mempermudah pencarian tema tersebut.

⁴⁵ John Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2014), halaman 186.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Alan, *Social Research*, op.cit., halaman 578.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan menyusun pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan pembagian sebagai berikut.

Bab I disebut sebagai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan data-data mengenai aktivitas nuklir India dan Pakistan mulai dari awal ditemukannya nuklir hingga kebijakan CMD muncul pada tahun 1998. Bab ini juga akan menjabarkan perbedaan dinamika nuklir yang muncul antara kedua negara sebelum CMD diresmikan tahun 1998 hingga setelah CMD diresmikan.

Bab III akan menjabarkan faktor-faktor yang membuat kebijakan CMD dapat menciptakan stabilitas nuklir di kawasan Asia Selatan berdasarkan data-data yang sudah terhimpun pada Bab II. Dari analisis tersebut, penulis akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

Bab IV berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, berupa temuan-temuan yang didapat dari penelitian ini, rekomendasi kebijakan dari penulis, serta kekurangan apa saja yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya.